

Penelitian Skema Hibah Dosen Muda
Perjanjian No: III/LPPM/2015-02/56-P

Identifikasi Potensi Perempuan di Akar Rumput dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia



Disusun Oleh:

Pembina

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

Ketua

Sylvia Yazid, Ph.D

Anggota

Elisabeth Dewi, Ph.D

Mabella Rehastris Azalia NPM: 2011330035

Rizkita Mardea Nurdiandra NPM: 2012330068

Gin Gin Ginanjar NPM: 2012330098

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
(2015)**

ABSTRAK	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
I.1 LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN PENELITIAN	3
I.2 TUJUAN KHUSUS.....	4
1.3. TARGET TEMUAN DAN LUARAN PENELITIAN	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III. METODE PENELITIAN.....	10
BAB IV. ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN	12
4.1. ANGGARAN BIAYA.....	12
4.2. AGENDA PENELITIAN.....	13
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	30

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di tingkat akar rumput ini telah berhasil mengidentifikasi peran perempuan dalam upaya perlindungan buruh migran perempuan (BMP) di Indonesia. Aktivistis perempuan dari Paguyuban Seruni di Kecamatan Sumbang, Banyumas menjadi model pemberdayaan perempuan untuk dapat melakukan serangkaian aktivitas perlindungan BMP Indonesia. Melalui pengembangan diri, proses pengayaan dan pencapaian yang optimal disertai dengan akses pendidikan dan demokratisasi sederhana, tiga aktivis perempuan yang diwawancarai secara mendalam telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi upaya perlindungan BMP di tingkat akar rumput. Tentu ada keterbatasan, ada permasalahan, tetapi itu semua tetap menjadi pemicu semangat mereka untuk maju dan berkarya sesuai dengan sumber daya, proses dan pencapaian diri dan komunitas yang saling berkaitan.

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang dan Permasalahan Penelitian

Kajian ini berkaitan dengan dua isu utama. Isu pertama adalah perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri di sektor informal dan domestik, sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, International Labour Organization (ILO), hingga 2013, dari sekitar 175 juta migran di seluruh dunia, setengah dari mereka adalah pekerja dan hampir setengah dari pekerja migran tersebut adalah perempuan.¹ Juga tercatat bahwa sekitar 15 % dari para pekerja tersebut memiliki status *irregular* atau tak berdokumen atau ilegal. Sementara itu, menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk tahun 2006-2012, dari total 3.998.592 pekerja yang ditempatkan di luar negeri, 3.048.267 adalah perempuan.² Tidak ada catatan resmi yang menyajikan dengan tepat jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tetapi data dari BNP2TKI³ juga menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga dan pengasuh bayi atau perawat orang tua merupakan jenis pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh tenaga kerja perempuan Indonesia di luar negeri. Pekerjaan-pekerjaan ini bersifat temporer, berdasarkan kontrak dan informal, yang membedakan tenaga kerja wanita Indonesia ini dengan tenaga kerja pria. Ditambah lagi, fakta bahwa mereka bekerja di rumah-rumah yang terisolasi dari lingkungan luar karena biasanya dianggap ruang privat, menjadikan tenaga kerja wanita ini rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak (*abuse*). Namun, kondisi ini tidak cukup diatur dalam sebagian besar kebijakan, peraturan dan undang-undang perburuhan, baik di negara asal maupun negara tujuan.⁴

Perhatian yang besar terhadap feminisasi migrasi tenaga kerja didorong oleh sejumlah faktor seperti (1) peningkatan tajam jumlah perempuan yang bekerja di luar negara asal mereka, (2) signifikansi ekonomi secara mikro dan makro yang didatangkan oleh remitansi yang mereka hasilkan dan (3) karakteristik kerja mereka yang cenderung

¹ ILO, 2013, *Migrant workers* <http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--en/index.htm> diakses 20 Februari 2013.

² BNP2TKI, 2013a, *Penempatan Berdasarkan Jenis Kelamin (2006-2012)*. <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6758-penempatan-berdasarkan-jenis-kelamin-2006-2012.html> diakses 20 Februari 2013.

³ BNP2TKI, 2013b, *Penempatan Berdasar Jabatan (2007-2012)* <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6759-penempatan-berdasar-jabatan-2007-2012.html> diakses 20 Februari 2013.

⁴ Hugo, G., 1992, *Women on the move: changing patterns of population movement of women in Indonesia*. dalam Chant, S. H. (ed.) *Gender and migration in developing countries*. London: Belhaven Press.

problematik, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.⁵ Walaupun gaji tak dibayarkan dan status tak berdokumen⁶ dapat saja terjadi baik pada tenaga kerja migran laki-laki yang bekerja di perkebunan, proyek bangunan atau pabrik maupun perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, kondisinya seringkali lebih buruk bagi pekerja rumah tangga dengan adanya penyiksaan dan pengurungan.

Sejumlah besar penelitian telah menjadikan feminisasi migrasi tenaga kerja ini sebagai fokus atau setidaknya elemen utama dari kajian mereka. Namun, dalam sebagian besar studi tersebut, perempuan telah digambarkan terutama sebagai "korban" dari mal-praktek dalam proses migrasi tenaga kerja. Tulisan ini berangkat dari gagasan bahwa adalah sangat penting untuk melihat perempuan tidak hanya sebagai "aktor pasif" dalam konteks migrasi tenaga kerja.

Isu kedua yang menjadi perhatian adalah potensi sejumlah perempuan ditingkat akar rumput yang berasal dari berbagai komunitas daerah "kantong" buruh migran perempuan yang berhasil melakukan sejumlah aktivitas dalam mencegah atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Perempuan di tingkat akar rumput menjadi subyek kajian yang sangat penting dikarenakan posisi mereka yang sangat dekat dan terlibat dalam keseharian hidup buruh mmigran perempuan.

I.2 Tujuan Khusus

Kajian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perempuan di tingkat akar rumput yang menjadi pemangku kepentingan terkait isu migrasi tenaga kerja dalam upaya perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di sektor informal di luar negeri. Secara lebih khusus, penelitian ini akan melihat: **(1) di mana posisi relatif**

⁵ Kajian tentang permasalahan yang biasanya dihadapi oleh tenaga kerja wanita Indonesia pada setiap tahapan migrasi mereka, sebelum keberangkatan, keberangkatan, selama bekerja dan setelah bekerja di luar negeri dapat dilihat dalam Yazid, S., 2013, *Indonesia's Civil Society in the Age of Democratization: NGO Responses on the Issue of Labour Migration*, Baden-Baden: Nomos.

⁶ Berbagai terminologi digunakan untuk menggambarkan pekerja migran yang migrasinya bermasalah. Terminologi yang lebih umum digunakan oleh akademisi dan aktivis adalah *undocumented* atau *irregular migrants*. Terminologi tenaga kerja migran ilegal biasanya digunakan oleh pemerintah, terutama dari negara tujuan. Perbedaan terminologi ini terkait dengan cara pandang yang berbeda tentang apa yang menyebabkan permasalahan migrasi dan bagaimana dampaknya terhadap status para migran. Mereka yang menentang penggunaan terminologi "illegal migrants" berpendapat bahwa para pekerja tersebut tidak ilegal sebagai manusia. Yang terjadi adalah pada satu titik dalam proses migrasi mereka, mereka tidak memiliki dokumen yang disyaratkan. Namun seringkali kondisi ini terjadi bukan karena kesalahan pekerja tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa seorang tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga harus melarikan diri dari majikannya yang melakukan penyiksaan namun karena paspornya ditahan oleh sang majikan, dia menjadi tidak berdokumen.

perempuan akar rumput vis-a-vis proses pembuatan kebijakan tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; (2) apa yang telah mereka lakukan di tingkat akar rumput; (3) upaya apa saja yang potensial untuk mereka lakukan dengan posisi mereka sekarang? (4) Dan tantangan dan peluang apa saja yang mungkin muncul.

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu masukan tentang upaya-upaya apa saja yang layak diujai oleh banyak pihak untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi buruh migran Indonesia pada sektor informal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sylvia Yazid⁷ telah membahas tentang upaya organisasi non-pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivisme untuk mendorong kebijakan yang lebih melindungi tenaga kerja Indonesia, terutama perempuan, sudah berlangsung cukup lama. Reformasi di Indonesia jelas membawa perubahan pada keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan dalam negeri cenderung lebih terbuka bagi keterlibatan pembangku kepentingan non-pemerintah. Sementara proses pembuatan kebijakan luar negeri cenderung masih tertutup.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Elisabeth Dewi⁸ di Jawa Barat dan Jawa Tengah telah berhasil mengidentifikasi sejumlah situasi kerja yang dihadapi oleh buruh migran perempuan di Saudi Arabia dan Malaysia pada umumnya. Situasi kerja tersebut memberikan sejumlah tantangan yang sering kali sangat spesifik berkaitan dengan keperempuanan buruh migran tersebut. Sebagai contoh, penelitian mengungkapkan belum adanya kebijakan sosial yang mendukung buruh migran perempuan untuk menjalankan peran mereka sebagai ibu, istri dan anggota komunitas dimana mereka berasal. Wawancara mendalam dengan buruh migran perempuan dan orang-orang terdekatnya menunjukkan bahwa masih belum optimalnya situasi yang ada berkaitan dengan proses pemberdayaan, investasi dan penguatan kapasitas mereka, sebagai perempuan. Kedua penelitian tersebut, belum berhasil mengidentifikasi sejumlah potensi perempuan di tingkat akar rumput yang dapat digunakan sebagai masukan pembuatan kebijakan. Sehingga, temuan dari penelitian ini akan dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal dan atau buku yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi mereka yang ingin mengetahui kondisi terkini aktivisme untuk perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia.

⁷ Yazid, S., *Op.cit.*

⁸ Dewi, Elisabeth, *Relationships between Women Migrant Workers and Their Children in Indonesia: Feminist Perspectives, Community Values and Motherhood*, Victoria University, 2010

1.3. Target Temuan dan Luaran Penelitian

Target temuan adalah pemetaan aktor-aktor perempuan di tingkat akar rumput dalam upaya perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia, apa posisi mereka dan upaya apa yang potensial untuk mereka lakukan.

Luaran kongkrit yang diharapkan dari penelitian ini adalah artikel jurnal yang dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional ataupun internasional dan bahan ajar untuk mata kuliah Gender dan Hubungan Internasional, NGO dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil, serta Perencanaan Strategis Organisasi Internasional.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah literatur yang mengkaji topik migrasi tenaga kerja temporer negara-negara Asia telah secara komprehensif dan terus menerus mendokumentasikan bagaimana bermasalahnya proses migrasi tenaga kerja, terutama bagi perempuan (Jones 2000, Chin 2002, Komnas Perempuan & Solidaritas Perempuan 2002 & 2003, HRW 2004, Hugo 2005, Pigay 2005, Anggraeni 2006, Kaur 2007, Yazid 2013, Dewi 2010). Seperti ditegaskan oleh Young⁹ dan Chant¹⁰, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan migran memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pekerjaan karena sebagian besar dari mereka yang bermigrasi tidak terampil atau semi-terampil. Ini telah membatasi pilihan pekerjaan mereka pada pekerjaan yang berstatus rendah dan dibayar rendah di sektor informal dan pelayanan. Dalam kebanyakan kasus, mereka dipaksa untuk melakukan apa yang dikenal sebagai pekerjaan yang 3Ds (*dirty, degrading and dangerous* atau kotor, merendahkan dan berbahaya) yang bersifat temporer dan dengan kontrak jangka pendek.

Penelitian ini bertitik tolak pada kajian kebijakan karena bagaimanapun juga bila yang diinginkan adalah tindakan yang luas cakupannya dan secara hukum mengikat maka hanya dapat dilakukan melalui kebijakan resmi pemerintah. Jika yang hendak dilakukan adalah merumuskan kebijakan yang lebih pro-buruh migran perempuan, perlu diidentifikasi keberadaan dan potensi perempuan yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja untuk memaksimalkan kontribusi mereka terhadap peningkatan perlindungan perempuan pekerja migran. Untuk itu penelitian ini menggunakan konsep “*policy process*” dari kajian kebijakan

⁹ Young, K. 2006 Globalization and the changing management of migrating service workers in the Asia-Pacific. dalam HEWISON, K. & YOUNG, K. (eds.) *Transnational Migration and Work in Asia*. Abingdon, Oxford, New York: Routledge, hal. 21.

¹⁰ Chant, S. 1992 Conclusion: towards a framework for the analysis of gender-selective migration. Dalam Chant, S. H. (ed.) *Gender and migration in developing countries*. London: Belhaven Press, hal. 204.

publik. Walaupun dalam prakteknya proses kebijakan itu tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak selalu berurutan, namun pada umumnya proses kebijakan publik dapat dibagi menjadi *agenda-setting*, dimana sebuah isu menjadi perhatian pemerintah; *policy formulation*, dimana opsi kebijakan diformulasi oleh pemerintah; *decision making*, ketika pemerintah memilih untuk bertindak atau tidak bertindak; *policy implementation*, ketika kebijakan dilaksanakan; dan *policy evaluation*, ketika hasil kebijakan dimonitor oleh pemerintah dan aktor-aktor di masyarakat.¹¹ Hasil dari evaluasi ini akan memulai kembali putaran kebijakan berikutnya. Penelitian ini akan menganalisa secara khusus sejumlah upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan di tingkat akar rumput untuk memberikan kontribusi bagi pembuatan kebijakan yang dapat menjamin perlindungan buruh migran perempuan.

Fokus pada identifikasi posisi perempuan dan apa yang telah mereka lakukan dan mungkin mereka lakukan dalam penelitian ini diinspirasi oleh karya Enloe (2000), *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*¹². Salah satu argumen penting dalam karya ini adalah bahwa jika kita ingin lebih memahami politik internasional secara komprehensif, kita perlu lebih memperhatikan pengalaman-pengalaman yang berbeda yang dialami oleh perempuan.¹³ Pada kasus perdagangan perempuan (*women trafficking*) misalnya, Enloe berpendapat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem internasional secara keseluruhan, kita harus mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa perempuan yang diperdagangkan, siapa yang diuntungkan, siapa yang menutup mata terhadap kasus-kasus penyiksaan yang terjadi.¹⁴ Pada kasus migrasi tenaga kerja perempuan yang bersifat temporer ini, diasumsikan bahwa pertanyaan seperti kenapa para perempuan tersebut memutuskan untuk bermigrasi, penyiksaan seperti apa yang mereka alami dan kenapa mereka disiksa sudah dibahas cukup dalam dalam literatur-literatur yang sudah ada. Karenanya, penelitian ini bertujuan mempotret perempuan Indonesia melalui cara yang digambarkan Enloe sebagai “*beyond the global victim*”¹⁵ atau tidak sekedar sebagai korban. Dengan beranjak dari pembicaraan berkepanjangan tentang bagaimana perempuan menjadi korban dalam proses migrasi yang bermasalah dan mulai mengidentifikasi perempuan-perempuan di tingkat akar rumput yang memiliki potensi beragam, diyakini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

¹¹ Howlett, M., Perl, A., Ramesh, M., 2003, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Ontario: Oxford University Press, hal 11.

¹² Enloe, C., 2000, *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, London, University of California Press, Ltd.

¹³ *Ibid.*, hal xiv.

¹⁴ *Ibid.*, hal xiii.

¹⁵ *Ibid.*, hal 15.

permasalahan buruh migran perempuan. Disamping itu, berkontribusi terhadap upaya meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran perempuan Indonesia.

Terkait topik pekerja rumah tangga, Enloe menggarisbawahi bahwa politik hutang internasional yang marak di akhir 1990an telah menekan pemerintah dari negara yang berhutang untuk mengadopsi kebijakan yang memotong anggaran bagi pelayanan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk membayar hutang.¹⁶ Kebijakan seperti ini mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda dan pada banyak kasus perempuan sebagai “manajer” dari rumah tangga menjadi yang lebih dirugikan. Lebih lanjut, dalam kondisi dimana lapangan pekerjaan menjadi langka ini, perempuan juga diharapkan untuk menjadi pencari nafkah, peran yang secara tradisional di budaya Asia dimainkan oleh laki-laki. Oleh karenanya, untuk mengakhiri kondisi yang merugikan ini bagi perempuan atau paling tidak mencegah kondisi ini memburuk, perempuan perlu eksis secara aktif dalam proses pembuatan, implementasi dan pengawasan kebijakan.

Penelitian sebelumnya yang berjudul Identifikasi Potensi Perempuan dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia telah berhasil mengidentifikasi sejumlah perempuan yang berkegiatan pada level nasional. Oleh karenanya penelitian ini bermaksud melanjutkan penelitian tersebut agar juga mencakup perempuan yang bergiat di akar rumput. Tabel 5 menunjukkan roadmap penelitian yang telah, sedang dilaksanakan dan rencana penelitian ke depan.

¹⁶ Ibid., hal 184.

Tabel 2. Roadmap Penelitian (2014-2020)

Tahun	2006-2010	2006-2010	2014	2015	2016	2016	2016-2017	2018-2020
Penelitian	Responding to Democratisation and Globalisation: NGOs Influence on Indonesia's Policies on Labour Migration	Relationships between Women Migrant Workers and Their Children in Indonesia: Feminist Perspective, Community Values and Motherhood.	Identifikasi Potensi Perempuan dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Indonesia di Luar Negeri	Identifikasi Potensi Perempuan di Tingkat Akar Rumput dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia	Pengabdian Masyarakat, Pelatihan Skill TKW	Pemetaan Stakeholders dan Evaluasi Kebijakan Mengenai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Perbandingan Kebijakan tentang Buruh Migran di Tingkat Regional	Tata kelola global yang Melindungi Tenaga Kerja Migran
Luaran	Publikasi Buku "Indonesia's Civil Society in the Age of Democratization: NGO Responses on the Issue of Labor Migration" 2013, Nomos, Baden-Baden.	Thesis	Terlaksana	Terlaksana	Rencana	Rencana	Rencana	
Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Sylvia Yazid 	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Dewi 	<ul style="list-style-type: none"> Sylvia Yazid Elisabeth Dewi 	<ul style="list-style-type: none"> Sylvia Yazid Elisabeth Dewi 	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Dewi Sylvia Yazid 	<ul style="list-style-type: none"> Sylvia Yazid Elisabeth Dewi 	<ul style="list-style-type: none"> Yulius Purwadi Hermawan Sylvia Yazid Elisabeth Dewi Ratih Indraswari 	<ul style="list-style-type: none"> Yulius Purwadi Hermawan Sylvia Yazid Elisabeth Dewi Ratih Indraswari

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengandalkan literatur dan wawancara sebagai sumber informasi. Pelaksanaan penelitian akan mengikuti tahapan-tahapan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahap-tahap Penelitian

Tahap	Rincian Kegiatan
Tahap I	Tujuan <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi perempuan akar rumput yang akan menjadi fokus penelitian. - Menghubungi yang bersangkutan untuk diwawancara. - Merancang outline penulisan
	Lokasi <ul style="list-style-type: none"> - Bandung (studi literatur dan media massa dan elektronik)
	Luaran: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar nama kelompok perempuan dari tingkat akar rumput
	Indikator Capaian: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan penelitian Tahap I (<i>Working paper</i>)
	Alokasi waktu: 3 bulan
Tahap II.	Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan wawancara dan pengumpulan data yang lebih mendetail. - Melakukan triangulasi data dengan anggota komunitas
	Lokasi: <ul style="list-style-type: none"> - Purwokerto, Jawa Tengah
	Luaran: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Wawancara dan Dokumen
	Indikator Capaian: <ul style="list-style-type: none"> - Transkrip wawancara dan kompilasi materi dari dokumen resmi
	Alokasi Waktu: 3 bulan
Tahap III.	Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis upaya yang telah dilakukan masing-masing objek penelitian
	Lokasi

	- Bandung, Indonesia
	Luaran
	- Analisis upaya dan potensi pemangku kepentingan.
	Indikator Capaian
	- Working paper
	Alokasi waktu 2 bulan
Tahap IV	Tujuan:
	- Penyusunan laporan penelitian
	Lokasi:
	- Bandung, Indonesia
	Luaran:
	- Laporan Penelitian
Indikator Capaian:	
- Laporan Penelitian	
- Draft artikel jurnal	
	Alokasi waktu: 2 bulan

BAB IV. ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

4.1. Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1.	Gaji dan upah	3.000.000
2.	Bahan habis pakai dan peralatan	
	- Pembelian buku dan jurnal	500.000
	- FGD	1.000.000
	- Honor Surveyor	1.000.000
	- Konsumsi	<u>500.000</u>
	Total	3.000.000
3.	Perjalanan (Purwokerto dan Cianjur, untuk wawancara dan mengambil data) 4 x @ Rp. 1.000.000,-	4.000.000
4.	Publikasi, Seminar, Laporan (pencetakan laporan, mengikuti seminar)	1.000.000
Jumlah		11.000.000

4.2. Agenda penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TAHAP I: 1. Identifikasi 2. Outline												
2	TAHAP II: 1. Wawancara 2. Triangulasi Data												
3	Tahap III: Analisis data												
4	Tahap IV: Penyusunan laporan dan penulisan artikel												
5	Penyerahan laporan final												

Bab V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu: pertama, mencari potensial narasumber yang dapat menjadi partisipan bahkan menjadi model pendampingan buruh migran perempuan (BMP) di tingkat akar rumput di Indonesia. Kedua, melakukan proses wawancara mendalam kepada sejumlah perempuan (dan laki-laki) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dengan peneliti. Terakhir, peneliti melakukan proses analisa isi wawancara untuk dituliskan di dalam laporan penelitian ini.

Dari serangkaian proses komunikasi, Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni yang berkedudukan di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas menerima peneliti dengan tangan terbuka. Peneliti bukan hanya berkesempatan untuk mewawancarai, bahkan terlibat langsung dalam acara Lokakarya Saluran Informasi Buruh Migran Indonesia (BMI) Banyumas dengan judul “Mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI/BMI sejak dari Hulu” di Desa Gumelar, Kabupaten Banyumas.

Berikut adalah daftar nama dan institusi individu yang berhasil diwawancarai untuk memperoleh kelengkapan informasi perlindungan buruh migran perempuan di tingkat akar rumput:

1. Radit – sukarelawan atau mahasiswa magang di Paguyuban Seruni
2. Jakarta Tisam – Diskominfo Kota Purwokerto
3. Erni – Disnakertrans Banyumas
4. Fatullah – LSM Infest Yogya – Proyek Manajer Pusat Sumberdaya Buruh Migran
5. Gatot – Camat Desa Gumelar, Banyumas
6. Narsidah – aktivis Paguyuban Seruni
7. Lily – aktivis Paguyuban Seruni
8. Sri Setiawati – aktivis Paguyuban Seruni

Profil 1: Narsidah

Seruni terbentuk di akhir tahun 2008 sebagai ‘utang’ Narsidah. Setelah pulang dari Hongkong, Narsidah lebih banyak membantu teman-temannya di berbagai organisasi di luar kota (Banyumas). Sampai akhirnya, Narsidah berpikir untuk mengumpulkan beberapa teman dan membuat organisasi di Banyumas. Berbekal dengan mengumpulkan kliping tentang

siapa saja tokoh-tokoh di Banyumas yang membicarakan isu migran dan isu perempuan, kemudian ia mendatangi satu-satu orang tersebut untuk diajak bertukar pikiran dan bantuan. Akhirnya setelah mendapat dukungan dari teman-teman akademisi, DPRD, dan aktivis, Seruni terbentuk, walaupun pada saat itu dinas tenaga kerja menyatakan keraguan untuk membentuk sebuah organisasi bagi buruh migran.

Walaupun banyak rintangan, seperti beberapa teman Narsidah dalam Seruni yang kemudian berangkat lagi ke luar negeri sebagai buruh migran dan modal pribadi yang digunakan untuk menangani kasus, tetapi Seruni tetap konsisten berdiri untuk membantu warga Banyumas. Banyak belajar dari teman-teman pengacara mengenai tata cara *follow up* kasus yang sudah diajukan ke dinas, sampai dengan memahami wewenang di dinas tenaga kerja dan DPRD membuat Narsidah semakin mengerti bagaimana dan apa yang harus ia lakukan dalam penanganan kasus.

Sejak saat itu, Seruni mulai paham mengapa dengan kinerja yang telah dilakukannya tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Malah liputan media tentang Seruni kemudian memicu hubungan yang tidak akur dengan dinas tenaga kerja. Mulai saat itu Narsidah memutuskan untuk lebih sering datang dan tidak hanya membawa kasus, tapi juga berbincang-bincang santai di dinas. Barulah ia mengetahui bahwa di Banyumas tidak ada anggaran untuk menangani kasus-kasus buruh migran.

Kemudian setiap terdapat kasus yang diajukan ke dinas tenaga kerja, Narsidah banyak menerima bantuan dana dari DPRD Banyumas, tidak hanya berhenti disitu Komisi D juga menyampaikan aspirasi ke Paripurna untuk membuat anggaran bagi penanganan kasus buruh migran yang kerap terjadi di Banyumas. Tidak cukup dengan komitmen orang-orang di dalam Seruni, mereka juga harus mengerti alokasi anggaran yang akan digunakan. Pada tahun 2011 diberikan anggaran sebanyak Rp.60.000.000 bagi penanganan kasus buruh migran sekaligus kegiatan sosialisasi dan upaya preventif bagi para buruh migran. Kemudian pada tahun 2012 anggaran ditambahkan menjadi Rp.150.000.000, tetapi pengalokasian dana dan pemahaman para anggota dewan akan permasalahan buruh migran hanya sebatas penanganan kasus. Sehingga anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk penanganan kasus, sedangkan sosialisasi seperti pelatihan migrasi aman dan upaya preventif tetap dilakukan tetapi tidak dapat menggunakan dana dari pemerintah.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Seruni yang menagih janji dari Bupati terpilih, Ir. H. Achmad Husein, di mana saat melakukan kampanye menjanjikan Perda tentang perlindungan buruh migran. Seruni kemudian dipanggil untuk

diskusi terkait dengan Perda tentang perlindungan buruh migran yang akan direalisasikan. Seruni mendesak agar Perda tersebut segera direalisasikan sebagai bentuk perlindungan mengingat Banyumas sebagai pemasok buruh migran terbesar keempat di Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 2000 buruh migran yang pergi setiap tahunnya. Akhirnya Perda tentang perlindungan buruh migran disahkan di awal tahun 2015.

Advokasi Seruni tidak hanya pada penanganan kasus buruh migran saja, tetapi juga pada perbaikan kebijakan. Sehingga, dinas-dinas yang terkait, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, sekarang memiliki program yang berkenaan dengan buruh migran. Penanganan kasus yang tidak maksimal dan hak-hak para buruh migran yang tidak terpenuhi kemudian menuntun adanya obrolan Narsidah dan teman-teman pengurus Seruni, adanya keinginan untuk tersedianya pengacara yang khusus berada di ranah isu buruh migran. Oleh karena itu, mereka saling mendukung satu sama lain untuk sekolah kembali di perguruan tinggi. Salah satu teman Narsidah yang telah mendapat gelar sarjana terlebih dahulu di Universitas Indonesia lebih memilih untuk bekerja pada *Bank of Tokyo* daripada kembali lagi ke Banyumas dan menjadi pengurus Seruni. Hal-hal seperti inilah kemudian yang juga diakui Narsidah akibat dari terbatasnya sumber daya manusia dan dana yang tersedia.

Tantangan utama yang dihadapi Narsidah selama berada di dalam Seruni adalah sumber daya manusia yang terbatas. Seruni yang terbentuk dari komunitas dan keinginan pribadi untuk membantu para buruh migran, kaderisasi menjadi tantangan tersulit yang ada. Banyak buruh migran yang berkeinginan menjadi pengurus dan membantu Seruni, tetapi karena adanya kepentingan lain, memiliki keluarga, atau bahkan kembali lagi menjadi buruh migran dan berangkat keluar negeri, kinerja mereka di Seruni menjadi tidak optimal. Hal tersebut dimaklumi Narsidah karena Seruni merupakan gerakan sosial dan sebagai ruang untuk belajar bersama sehingga peraturan yang ada juga tidak mengikat seperti bekerja. Ketersediaan materi dan modal juga membuat gerakan Seruni menjadi terbatas, akan tetapi Narsidah dan teman-teman di dalam Seruni tetap berusaha semampunya dalam membantu para buruh migran.

Peluang ke depannya bagi Narsidah dan teman-teman di dalam Seruni adalah lebih mengajak orang-orang untuk berorganisasi. Narsidah mengatakan bahwa melalui kegiatan berorganisasi akan memberikan kekuatan dan dukungan dari satu sama lain, terutama di Seruni yang spesifik berisi para buruh migran dan keluarganya sehingga ada perasaan senasib sepenanggungan. Selama Seruni bergerak dalam bidang ini, baru sebagian kecil dari wilayah basis buruh migran di Banyumas yang dapat ditangani oleh Seruni. Banyak kepada desa atau kecamatan yang meminta Seruni untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan

bagi warganya, akan tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan modal yang ada, maka seringkali Narsidah tidak menyanggupi permintaan tersebut.

Memutuskan untuk sekolah bergantian agar penanganan dan kinerja Seruni tidak terganggu, Narsidah mempersilahkan Lili untuk masuk ke perguruan tinggi terlebih dahulu. Dengan bantuan dana dari para anggota dewan dan beberapa tokoh yang sebelumnya sudah bekerja sama dari Seruni, akhirnya Lili dapat masuk dan bersekolah pada tahun 2011 di Universitas Jendral Soedirman di Fakultas Hukum. Satu tahun kemudian Narsidah juga bersekolah di Universitas Wijayakusuma Purwokerto di Fakultas Hukum dengan bantuan biaya yang diberikan oleh Keuskupan Purwokerto. Narsidah berencana membuat skripsi tentang perjanjian penempatan buruh migran yang ia lihat masih banyak hal yang belum terbuka informasinya.

Narsidah berpesan bagi para perempuan sebagai calon buruh migran, mereka harus mempersiapkan diri dengan matang, meskipun di luar negeri hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga tetapi harus mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu dengan baik, sekaligus memiliki target waktu dan pencapaian di masa depan. Sehingga dengan menjadi buruh migran, para perempuan tidak hanya melihat materi yang akan didapat tetapi juga harus memanfaatkan waktu untuk belajar. Sedangkan untuk para buruh migran yang sedang menjalankan tugasnya, Narsidah berpesan agar melihat kembali apa yang sudah mereka cita-citakan sebelum berangkat, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan bisa menggapai banyak hal dengan menyiapkan diri setelah pulang ke Indonesia. Menjadi buruh migran bukanlah cita-cita utama, menjadi buruh migran hanyalah sebuah batu loncatan sebagai tempat dan waktu untuk belajar. Walaupun stigma menjadi buruh migran adalah suatu hal yang buruk, tetapi sebisa mungkin para buruh migran dapat memberikan bukti atau contoh yang baik serta berkualitas, seperti beberapa teman Narsidah yang berangkat sebagai buruh migran kemudian pulang lagi ke Indonesia dengan gelar sarjana atau membuka usaha di daerahnya.

Narsidah merupakan mantan buruh migran di Singapura pada tahun 1998. Keberangkatan Narsidah ke Singapura sebagai buruh migran diawali dengan adanya krismon yang menyebabkan tempatnya bekerja dulu memutuskan untuk mengadakan pengurangan karyawan. Kemudian berpikir untuk menjadi buruh migran mengikuti jejak kakak pertamanya. Ia ditampung di PT selama dua bulan sebelum diberangkatkan ke Singapura. Awal bekerja sebagai buruh migran di negeri orang, Narsidah tidak betah dan selalu ingin pulang kembali ke Indonesia. Hanya bertahan satu tahun dua bulan, Narsidah kemudian pulang dengan biaya sendiri karena tidak mau kembali lagi bekerja di Singapura.

Sampai Indonesia Narsidah tidak tahu harus bekerja apa, maka ia memutuskan untuk menjadi buruh migran lagi. Dibujuk juga oleh sponsor untuk berangkat lagi ke Taiwan. Ibu dari satu anak mengalami berbagai macam peristiwa yang membuatnya memiliki keinginan untuk membuat organisasi setelah pulang dari luar negeri. Sebuah organisasi yang berkegiatan untuk mengorganisir buruh migran; membuat kegiatan untuk belajar bersama serta membantu teman-teman buruh migran dan keluarganya yang memiliki persoalan terkait buruh migran.

Di penampungan melihat kondisi yang tidak manusiawi, fasilitas dan air kurang sehingga para calon buruh migran harus mengantri dari jam 3 pagi untuk ke kamar mandi. Minimnya fasilitas tempat tidur juga menyebabkan pertengkaran diantara para calon buruh migran. Makanan yang disediakan juga hanya berupa singkong satu potong pada pagi hari, atau hanya sayur dan ikan asin. Selain fasilitas yang kurang memadai, Narsidah juga melihat terdapat beberapa teman calon buruh migran yang sudah berada di penampungan selama satu tahun dan tidak kunjung diberangkatkan ke negara tujuan. Melihat hal tersebut Narsidah kemudian merasa perlu untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemilik PT. Narsidah kemudian mengajak teman-teman di dalam penampungan untuk menuntut perbaikan kondisi kepada pemilik PT.

Pada malam kedua Narsidah dan teman-temannya ditangkap oleh para satpam saat melakukan diskusi. Sekitar 300 calon buruh migran disekap dan dikunci di dalam ruangan. Kemudian mereka akhirnya melemparkan kertas keluar ruangan dengan harapan ada yang membantu untuk menelpon polisi atau LSM. Akhirnya mereka mencari jalan keluar dengan membakar gembok di pintu keluar, sehingga mereka berhasil keluar dari sekapan para satpam. Beberapa jam kemudian sebuah LSM mengevakuasi para calon migran tersebut. Dengan bantuan dari LSM dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada saat itu, Khofifah Indar Parawansa, mereka ditempatkan di pondok wisma haji dan difasilitasi selama beberapa hari.

Narsidah masih menginginkan untuk menjadi buruh migran, kali ini tidak lagi berangkat ke Taiwan tetapi ke Hongkong. Setelah berbincang-bincang dengan para pengurus sekaligus buruh migran yang ada di Hongkong, Narsidah memberanikan diri untuk ke PT tanpa menggunakan sponsor. Beberapa PT menolak karena Narsidah tidak memiliki sponsor untuk keberangkatannya ke Hongkong, akhirnya ada satu PT yang mau menerimanya tanpa sponsor. Ternyata perlakuan yang diberikan PT terhadap Narsidah yang tidak memiliki sponsor berbeda dengan calon buruh migran lain yang memiliki sponsor, Narsidah selalu diawasi dan agak dijauhkan dari calon buruh migran lainnya. Narsidah juga sering diajak

keluar oleh para staf PT atau sering diminta untuk menemani istri direktur keluar, sehingga ia tidak memiliki waktu belajar untuk bekal keberangkatannya. Saat *interview*, Narsidah dikritik bahwa kemampuan bahasanya belum memadai untuk diberangkatkan ke Hongkong dan masih banyak kekurangan lainnya. Mulai saat itu, Narsidah menolak setiap ajakan keluar dan memilih untuk fokus belajar. Keputusannya untuk fokus belajar dan diperbolehkan untuk keluar PT pada hari akhir pekan kemudian memicu kecemburuan para calon buruh migran lainnya. Narsidah diteror oleh para buruh migran senior dan diperintahkan untuk tidur di dekat pintu agar mudah diawasi. Narsidah sebenarnya juga sadar jika hanya dia yang boleh keluar pada akhir pekan maka tidak adil bagi para calon buruh migran lainnya, maka ia memutuskan untuk menyarankan pada direktur untuk juga memberikan hari bebas bagi para calon migran lainnya di akhir pekan. Direktur PT tersebut kemudian menyetujuinya, sehingga pada akhir pekan para calon buruh migran dibebaskan dari kegiatan belajar dan diperbolehkan keluar PT untuk urusan pribadi. Hal tersebut kemudian malah membawa dampak negatif seperti ada beberapa calon buruh migran yang kabur dan hamil.

Keaktifan Narsidah di PT tersebut kemudian menunda keberangkatannya selama 6 bulan, sampai akhirnya berangkat ke Hongkong. Walaupun di sana ia mendapatkan pekerjaan yang terhitung mudah, yaitu hanya menjaga lansia, tetapi hak-haknya tidak dipenuhi dan Narsidah hanya diberikan separuh dari gaji yang dijanjikan. Para buruh migran yang di Hongkong memberitahu Narsidah bahwa sudah ada ketentuan hukum di sana bahwa setiap hari minggu merupakan hari libur bagi para buruh migran. Akan tetapi, majikan Narsidah tidak menggubris hal tersebut, sehingga gaji Narsidah dipotong setiap ia keluar rumah pada hari minggu untuk bertemu dengan teman-temannya di dalam organisasi. Melihat ketidakadilan tersebut, Narsidah melaporkan majikannya, sampai staf dari PT di Jakarta datang ke Hongkong untuk bertemu Narsidah. Staf dari PT malah menyalahkan Narsidah yang pergi keluar di hari minggu untuk bertemu teman-temannya di dalam organisasi, bukannya membela haknya yang memang mendapatkan hari libur di hari minggu.

Narsidah kemudian minta untuk mendapatkan majikan baru dengan alasan haknya tidak dipenuhi oleh majikannya yang lama dan orang yang ia jaga telah meninggal dunia. Di majikan terakhirnya, nasib Narsidah juga tidak berjalan mulus, majikannya mengalami pailit sehingga tidak membayar gajinya selama tiga bulan. Walaupun pada akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan baik-baik melalui mediasi. Selama di Hongkong, Narsidah aktif di Indonesian Migrant Worker Union (IMWU), merupakan satu-satunya serikat buruh yang terdaftar di pemerintahan Hongkong. Dalam organisasi tersebut Narsidah fokus terutama di

pendampingan kasus, penyuluhan, dan merancang kegiatan untuk edukasi bagi buruh migran di Hongkong.

Setelah pulang dari Hongkong, Narsidah memutuskan untuk mengambil kejar paket C untuk mendapatkan ijazah sehingga dapat menjalankan cita-citanya untuk belajar dan berorganisasi. Di sela-sela waktu belajarnya untuk mengambil kejar paket C, Narsidah meluangkan waktunya untuk menangani kasus buruh migran yang ada. Narsidah dan teman-teman di Seruni juga berpikir bagaimana caranya untuk membagi porsi dalam penanganan kasus dengan dinas tenaga kerja, karena tentu saja tidak dapat semua kasus ditangani Seruni mengingat keterbatasan sumber daya manusia, tenaga, dan modal yang ada.

Profil 2: Lily

Lily merupakan aktivis Paguyuban Seruni di wilayah Desa Datar, Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini usia Lily adalah 36 tahun. Lily menduduki posisi sebagai ketua beberapa kali di dalam Paguyuban Seruni. Lily merupakan salah satu mahasiswa semester 8 Jurusan Fakultas Hukum di Universitas Soedirman. Kesibukan Lily selain membantu mengelola Seruni, juga sedang menyusun tugas akhir perkuliahannya. Topik yang menjadi penelitian dalam tugas akhir atau skripsi Lily adalah mengenai permasalahan buruh migran terutama berkaitan dengan peran dinas sosial tenaga kerja untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia. Tingkat pendidikan terakhir Lily sebelum menduduki bangku perkuliahan adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Jurusan yang diambil oleh Lily ketika SMK adalah jurusan perhotelan.

Aktivitas yang dilakukan oleh Lily dan teman-teman lainnya terkait permasalahan buruh migran tidak hanya dalam advokasi buruh migran saja, tapi juga bertindak sebagai aktor yang mendorong kebijakan pemerintah daerah. Seperti disahkannya Perda no.2 tahun 2012 tentang perlindungan TKI di Banyumas yang menjadi janji bupati banyumas ketika kampanye. Tidak hanya itu, aktivitas lain yang dilakukan oleh Lily bersama dengan Seruni adalah mampu mempengaruhi kebijakan terkait permasalahan anggaran untuk penyelesaian masalah buruh migran dari Rp.60.000.000 menjadi Rp.150.000.000. Selain sebagai katalisator dalam mempengaruhi kebijakan, Lily melakukan upaya-upaya pemberdayaan terhadap mantan buruh migran di wilayah Banyumas. Fokus utama pemberdayaan yang Lily dan Paguyuban Seruni lakukan adalah salah satunya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan membuat keset dari kain perca, pelatihan yang berkaitan dengan perikanan dan perternakan serta pelatihan mengenai boga rasa.

Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya pelatihan saja. Lily juga mengupayakan pemasaran hasil produk yang dihasilkan seperti kerajinan keset kain perca yang dipasarkan di Hero tempat untuk kebutuhan rumah tangga di pratista harsa yang berdekatan dengan alun-alun pemerintah kabupaten. Selain program tersebut Lily juga melakukan program seperti Children Left Behind tentang anak-anak yang terlantar yang dilaksanakan 6 bulan dan juga program Mahnetik (Rumah Internet untuk TKI) yang berlangsung dalam setahun. Namun, Lily sangat menyayangkan program-program tersebut hanya berlangsung satu kali. Hal tersebut dikarenakan program-program yang dilakukan diberikan anggaran oleh pihak eksternal seperti Yayasan TIFA, KARO, dan pemerintah kabupaten.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Lily. Pertama, tantangan yang dihadapi Lily dengan Paguyuban Seruni adalah terkait biaya operasional atau anggaran bagi terlaksananya program-program yang telah Lily dan Seruni agendakan kedepannya. Kedua, mengenai sumber daya manusia dan pengkaderan. Pengkaderan disini maksudnya adalah sulit menemukan kader yang mau dan berkemampuan meneruskan perjuangan Lily dan teman-teman di Paguyuban Seruni. Kesulitan tersebut juga dikarenakan profesi seperti Lily bukan berdasarkan seberapa besar uang yang didapat, tetapi seberapa besar keinginan yang akan dicapai. Selain tantangan dari internal, Lily juga menghadai tantangan dari eksternal. Tantangan yang dihadapi seperti pertentangan dengan PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dalam mengurus masalah PJTKI yang diintimidasi.

Harapan Lily kedepannya adalah ingin terus berjuang untuk Paguyuban Seruni. Generasi penerus untuk memperjuangkan permasalahan buruh migran sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan permasalahan buruh migran tidak selesai hingga saat ini saja. Lily memiliki keinginan agar bagi calon buruh migran untuk mencari informasi yang valid, lengkap dan benar agar menjadi buruh migran yang aman. Perencanaan yang matang terkait masalah pengelolaan hasil upah kerja harus dibuat perencanaan agar bermanfaat sesuai kebutuhan.

Lily merupakan mantan buruh migran yang bekerja di Hong Kong selama 7 bulan. Lily menjadi korban PHK sepihak oleh majikannya. Lily menjadi buruh migran sejak September 2002 dan pulang ke Indonesia pada bulan April tahun 2003. Lily merupakan buruh migran yang berasal dari Desa Datar, Banyumas Jawa Tengah. Sebelum menjadi buruh migran di Hong Kong mba Lily menjalani masa penampungan selama 4 bulan. Pada awalnya, sebelum bergabung dan mendirikan Seruni, Lily bertemu dengan rekan-rekan LSM dan Narsidah yang pernah bekerja di Hong Kong, di Jakarta. Lily menetap di Jakarta hampir satu tahun. Lily belajar banyak hal setelah kepulangannya ke Jakarta bersama rekan-rekan

LSM dan Narsidah. Akhirnya, setelah hampir setahun, Lily memutuskan untuk kembali pulang ke desa Datar di Banyumas untuk mendirikan Paguyuban Seruni dan membantu menyelesaikan permasalahan buruh migran yang terjadi di desanya.

Profil 3: Sri Setyawati

Sri Setyawati atau biasa dipanggil Sri merupakan salah satu aktivis Paguyuban Seruni. Sri merupakan aktivis Seruni yang fokus berkegiatan di wilayah Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah. Di wilayah Gumelar, secara spesifik Mba Sri berkegiatan di Desa Panikaben. Gumelar merupakan salah satu kantong TKI yang cukup besar di Jawa Tengah. Sri lahir pada tanggal 15 September 1975. Sri merupakan ibu dari 3 (tiga) orang anak. Anak pertama kuliah di Poltekkes Kemenkes Semarang program studi Kesehatan Lingkungan. Anak kedua kelas XII SMA dan anak ketiga kelas II SD serta memiliki satu suami. Sri dulu hanya lulusan SMP, saat kembali ke Indonesia dan memutuskan untuk tidak menjadi buruh migran lagi, Sri mengikuti Paket C. Setelah mengikuti Paket C, Sri mengikuti perkuliahan PG PAUD dan sekarang sudah semester 6.

Sri mengelola PAUD sejak tahun 2009 hingga sekarang. Nama PAUD-nya adalah Pos PAUD Jatiwaluyo. PAUD-nya berada di Desa Panikaben. PAUD ini memiliki 37 (tiga puluh tujuh) murid dengan 5 (lima) tenaga pengajar. 3 (tiga) orang merupakan mantan buruh migran. Seluruh tenaga pengajar didorong Sri untuk kuliah. 4 (empat) orang kuliah dan 1 (satu) orang sedang Paket C. 2 (dua) tahun pertama murid tidak diwajibkan untuk membayar. Tahun ketiga diminta iuran Rp.5.000, kemudian setiap tahun naik Rp.2.500 hingga akhirnya sekarang iurannya Rp.15.000. Pada tahun 2014, PAUD terdanai karena Sri aktif di PNPM. PNPM memberikan bantuan hingga akhirnya Sri mampu membangun gedung untuk PAUD, namun tanahnya milik Sri. Per 10 Februari 2015, Sri terlibat didalam kepengurusan PAUD kabupaten.

Aktivitas Sri di Seruni Gumelar ada 3 (tiga): pertama, terkait dengan Bina Keluarga TKI. Di Gumelar, khususnya di Desa Panikaben terdapat cukup banyak mantan buruh migran, kurang lebih 400 (empat ratus) orang. Sri berusaha untuk meyakinkan para mantan buruh migran untuk tidak pergi lagi ke luar negeri. Sri berusaha untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan akan apa yang dapat dilakukan sepulang dari luar negeri. Kegiatan lain yang dilaksanakan Bina Keluarga TKI adalah pendidikan cara pola asuh anak kepada bapak-bapak yang istrinya menjadi buruh migran.

Kedua, terkait dengan advokasi. Banyak permasalahan yang terjadi pada buruh migran, seperti: uang jaminan yang tidak dikembalikan karena banyak perusahaan penyalur tenaga buruh migran yang tutup sehingga dokumen tidak jelas keberadaannya; kemudian beberapa tahun tidak bisa pulang ke kampung halaman. Namun pada akhirnya dapat diselesaikan.

Ketiga, terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan adalah pembuatan keset dari kain perca. Pembuatan keset dari kain perca ini difasilitasi oleh Seruni dan Universitas Soedirman. Sri berusaha sangat keras dalam proses pencarian bahan baku dan proses pemasaran. Namun, minat para mantan buruh migran hanya sampai sebatas ingin dibayar dari kegiatan pemberdayaan ekonomi ini. Sementara, Sri berharap dari kegiatan ini para mantan buruh migran dapat belajar berorganisasi. Selain itu sumber daya manusia yang memiliki keahlian di dalam bidang desain masih minim, sehingga sulit untuk melakukan inovasi lain.

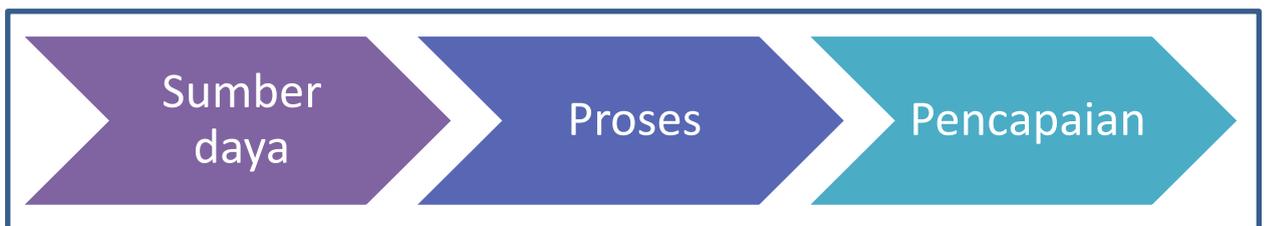
Tantangan yang Sri hadapi selama menjadi aktivis di Paguyuban Seruni ada 3 (tiga). Pertama, terkait kaderisasi, setiap ada kegiatan di kabupaten, apabila Sri tidak berangkat, sama sekali tidak ada kader yang mau berangkat. Tidak ada rasa memiliki diantara mereka. Mereka cenderung tidak peduli. Mereka cenderung ingin lebih banyak menerima bantuan dibandingkan bergerak langsung untuk melakukan urun rembug. Kedua, terkait pemasaran produk dari hasil pemberdayaan ekonomi. Dalam proses produksi Sri masih mampu menangani, namun ketika di tahap pemasaran Sri kesulitan. Mungkin pada awalnya yang memproduksi keset dari kain perca masih sedikit sehingga lebih mudah dijual. Akan tetapi, ketika proses produksi keset kain perca yang sudah menjamur di lingkungan sendiri, maka permintaan akan produk pun menurun. Usaha untuk memasarkan di luar wilayah Gumelar sudah dilakukan, namun tetap mengalami kesulitan. Ketiga, terkait dengan pendanaan. Selama ini, pendanaan berasal dari uang Sri sendiri. Tidak jarang Sri mengalami kerugian.

Harapan Sri untuk rekan-rekan buruh migran adalah milikilah niat yang kuat untuk mengembangkan potensi diri di kampung halaman. Perbandingan pendapatan yang didapat disini dan di luar negeri memang jauh, namun milikilah dasar dan niat yang kuat untuk mengabdikan di tanah sendiri, dengan begitu dapat membantu rekan-rekan mantan buruh migran yang lain. Selain itu, untuk teman-teman buruh migran yang masih berada di luar negeri, Sri berharap teman-teman buruh migran dapat lebih aktif. Dapat melalui keikutsertaan dalam organisasi buruh migran asal Indonesia atau aktif dalam menulis, sehingga dapat mengembangkan potensi diri.

Sri pertama kali menjadi buruh migran pada tahun 1999. Negara pertama yang menjadi ladang mencari rezeki adalah Taiwan. Sri bekerja disana 5 tahun. Kontrak pertama pada tahun 1999 kemudian pulang di tahun 2001. Berangkat lagi pada tahun 2002, kembali pada tahun 2005. Sekembalinya, Sri membuka warung kecil, namun lama kelamaan jenuh. Kemudian Sri mengikuti berbagai pertemuan, hingga akhirnya aktif di PKK yang mengantarnya untuk mendirikan PAUD.

Ketiga profil perempuan aktivis Paguyuban Seruni di atas menjelaskan secara langsung dan rinci bahwa perlindungan BMP Indonesia haruslah dimulai dari pemberdayaan perempuan-perempuan yang terlibat di dalam proses tersebut. Harus disadari bahwa tanpa pemberdayaan, maka upaya perlindungan menjadi satu hal yang mustahil. Narsidah, Lily dan Sri adalah contoh individu perempuan yang telah mampu mengusung konsep pemberdayaan melalui sejumlah proses perubahan dirinya, keluarganya serta komunitasnya.

Menurut Kabeer (1999) ada 3 dimensi utama yang saling berkaitan yang mempengaruhi proses pemberdayaan: *resources*, *agency* dan *achievements*. Untuk kepentingan penelitian ini, maka istilah *resources* akan digantikan dengan sumber daya; *agency* dengan proses; serta *achievements* dengan pencapaian. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi proses perubahan sosial yang menjadi semangat dasar pemberdayaan, dengan skema berpikir sebagai berikut:



Sumber daya

Sesuai dengan penjelasan dari Kabeer (1999) sumber daya bukanlah suatu konsep yang abstrak melainkan suatu konsep yang dinamis dan dapat menjadi perantara perpindahan dari satu bentuk kekuatan ke bentuk kekuatan lainnya. Kekuatan tersebut kemudian didistribusikan melalui sejumlah institusi dan hubungan di dalam masyarakat. Dengan melihat penjelasan tersebut, ketiga aktivis Paguyuban Seruni menggunakan posisi yang mereka miliki untuk memperkuat sejumlah proses pembuatan keputusan, internal dan

eksternal, berkaitan dengan perlindungan BMP di wilayah kerja mereka. Melalui peningkatan kemampuan mereka, secara individu dan lembaga, mereka dapat mempengaruhi pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan prioritas pembuatan kebijakan di tingkat akar rumput, seperti kecamatan, hingga di tingkat yang lebih tinggi seperti kabupaten. Upaya peningkatan kemampuan yang mereka lakukan adalah melalui jenjang pendidikan formal yang akan dibahas di bagian lain secara lebih mendalam.

Proses

Sejumlah aktivitas mereka lakukan, baik secara pribadi maupun berkelompok, untuk menyatakan keberpihakan mereka kepada perlindungan BMP di sekitar wilayah kerja mereka. Secara terbuka dan nyata, mereka menyatakan pilihan hidup untuk terlibat secara langsung dalam serangkaian proses pencapaian kekuatan yang dikenal dengan istilah *power within*. Mereka belajar untuk melakukan serangkaian proses negosiasi, tawar menawar bahkan protes untuk mencapai posisi yang lebih menguntungkan diri mereka, komunitas yang mereka wakili, bahkan BMP dalam sejumlah proses pembuatan keputusan tentang hidup mereka. Sejalan dengan penjelasan Kabeer (1999), proses yang mereka jalani didasari arti, motivasi dan tujuan yang mereka wujudkan dalam sejumlah hal yang mereka lakukan dalam keseharian mereka sebagai bagian dari komunitas atau paguyuban. Melalui penuturan ketiga aktivis Paguyuban Seruni di atas, kita dapat melihat bahwa proses seringkali berhadapan dengan keterbatasan institusi atau komunitas atau paguyuban, terutama berkaitan dengan masalah kaderisasi. Keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan penurunan kemampuan mereka untuk membuat pilihan-pilihan yang strategis dalam hidup mereka. Permasalahan tersebut, dalam jangka panjang bahkan dapat membuat perubahan dalam cara mereka memandang diri mereka dan kapasitas mereka untuk memberdayakan dirinya dan komunitas yang ada di sekitar dirinya.

Pencapaian

Sumber daya dan proses yang dijalani oleh ketiga aktivis Paguyuban Seruni menunjukkan bahwa kemampuan dan potensi yang mereka miliki telah membuat situasi yang mereka jalani hingga sekarang ini. Mereka telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menyatakan apa yang telah mereka capai dan apa yang masih ingin mereka lakukan, baik secara individu maupun bersama komunitas. Narsidah, Lily dan Sri adalah perempuan

yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memerdekakan dirinya dan menjadi sosok yang lebih mandiri sehingga tidak perlu lagi bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidupnya.

Dari ketiga sosok perempuan ini, kita dapat melihat keterkaitan antara sumber daya, proses dan pencapaian dalam bentuk yang sangat aktif. Secara aktif dan berkelanjutan, mereka meningkatkan kapasitas diri mereka sendiri, sebagai sumber daya, untuk dapat meningkatkan proses kehidupan mereka sebagai individu dan bagian dari komunitas. Melalui sejumlah aktivitas, mereka mempertanyakan dan menafsir ulang peran dan tanggung jawab yang mereka miliki untuk dapat melakukan transformasi bentuk perlindungan BMP Indonesia, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Kabeer (1999) menjelaskan bahwa ketiga dimensi yang telah dibahas di atas: sumber daya, proses dan pencapaian haruslah dilihat sebagai alur yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan suatu dimensi akan mempengaruhi dimensi lainnya. Apa yang telah dicapai pada dimensi pencapaian akan dapat mempengaruhi pencapaian-pencapaian lainnya di masa berikutnya. Pada ketiga perempuan aktivis ini, dapat kita lihat bagaimana pencapaian-pencapaian mereka sangat didasari pada kesadaran mereka untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai bagian pemberdayaan dirinya untuk mampu melindungi BMP lainnya.

Akses pendidikan

Ketiga aktivis Paguyuban Seruni telah membuktikan bahwa akses terhadap pendidikan akan membantu pemberdayaan perempuan. Narsidah dan Lily membulatkan tekadnya dengan segenap upaya untuk menjalani studi jenjang S-1 di Fakultas Hukum untuk memampukan diri mereka mendampingi BMP dari aspek hukum di berbagai tingkatan yang berbeda. Sedangkan Sri, di sela-sela kesibukannya sebagai aktivis dan ibu dari 2 anak, telah menetapkan langkahnya di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mewujudkan cita-citanya membentuk generasi baru yang lebih baik di masa mendatang.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kabeer (1999), terdapat sejumlah perubahan mendasar yang diakibatkan oleh jenjang pendidikan yang ditempuh oleh ketiga aktivis Paguyuban Seruni, sebagai berikut:

1. Pendidikan telah mampu mempengaruhi pemikiran dan perilaku ketiga aktivis tersebut. Mereka yang awalnya adalah berasal dari komunitas marjinal, yaitu mantan BMP dari desa terpencil dan miskin, telah mampu meningkatkan proses hidupnya untuk memiliki kekuatan dalam melakukan sejumlah upaya perlindungan BMP lainnya yang berasal dari komunitas yang sejenis dengan mereka.
2. Pendidikan telah membuka kesempatan yang lebih luas pada mereka untuk mengakses pengetahuan, informasi dan ide-ide yang baru. Melalui kontak yang lebih luas dengan dunia di luar keluarga dan komunitas mereka, mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan hal-hal tersebut secara lebih efektif untuk proses pendampingan dan perlindungan BMP, terutama calon-calon BMP yang lebih muda dari segi usia dan pengalaman.
3. Pendidikan telah meningkatkan kemampuan pemeliharaan hidup mereka secara individual dan komunitas sesuai dengan pilihan yang mereka ambil.
4. Pendidikan telah membawa dampak yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan yang mereka miliki di dalam maupun di luar rumah tangga mereka masing-masing. Dalam hal ini, pendidikan telah memungkinkan perempuan untuk memiliki peran yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan lebih jauh, pendidikan telah mendorong perempuan untuk mempertanyakan dominasi laki-laki di dalam rumah tangga dan komunitas mereka. Singkat kata, perempuan dimampukan untuk memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Hingga saat ini, Lily masih memutuskan untuk melajang sedangkan Narsidah memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak satu-satunya setelah bercerai dari suaminya. Sri dan suaminya hidup bersama dengan kedua anaknya dengan kesibukan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, tanpa ada keluhan yang berarti.

Aksi bersama

Serangkaian aktivitas yang dijalani oleh 3 perempuan aktivis Paguyuban Seruni dan keberhasilan mereka mendorong proses transformasi seputar perlindungan BMP di berbagai tingkatan telah menunjukkan aksi yang disebut oleh Kabeer (1999) sebagai 'tekanan politik dari bawah'. Perempuan-perempuan yang telah berhasil memperdayakan diri mereka,

dengan menggunakan berbagai proses, mewakili kelompok marjinal, berjuang memperoleh hak mereka di berbagai tingkatan.

Aksi bersama yang mereka lakukan bersama dengan lembaga pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, mahasiswa, dan LSM adalah pusat terjadinya transformasi sosial, baik bagi diri mereka masing-masing ataupun Paguyuban Seruni sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Sebagai akibatnya, hal tersebut membuka kesempatan yang lebih luas untuk mereka berkiprah di wilayah publik secara lebih luas, yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu panjang akan ‘menantang’ kekuatan patriarki yang ada dalam berbagai institusi.

Paguyuban Seruni memang tidak dimaksudkan untuk berkiprah dalam tingkatan politis, tetapi bentuk-bentuk yang mereka perjuangkan, yaitu perlindungan BMP adalah sangat berkaitan dengan proses kesetaraan, demokratisasi, pembangunan dan penguatan identitas warga desa, terutama BMP atau calon BMP. Hal ini sangat mendorong perempuan-perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan dan peningkatan kesejahteraan hidup mereka sehari-hari sebagai bagian dari komunitas.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sejumlah tokoh perempuan di akar rumput yang dipandang memiliki pengaruh dalam upaya perlindungan BMP Indonesia. Penelitian ini masih sangat bisa dikembangkan dengan memperdalam pertanyaan penelitian dengan menanyakan pertanyaan lanjutan yang muncul dari analisa terhadap jawaban yang didapatkan, menambah jumlah responden supaya mencakup kelompok aktor lain seperti BMP sukses dan aktor laki-laki, dan memperluas fokus penelitian supaya mencakup aspek-aspek lain dari upaya perlindungan seperti upaya-upaya yang lebih diarahkan pada BMP itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas. Rencana penelitian selanjutnya, sesuai road map penelitian adalah pemetaan stakeholders dan kebijakan terkait buruh migran Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. 2006 *Dreamseekers : Indonesian women as domestic workers in Asia*, Jakarta, Equinox Pub. : International Labour Organization.
- BNP2TKI 2013a *Penempatan Berdasar Jabatan (2007-2012)* [Online]. Available: <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6759-penempatan-berdasar-jabatan-2007-2012.html> [Accessed 20 February 2013].
- BNP2TKI 2013b. *Penempatan Berdasarkan Jenis Kelamin (2006-2012)* [Online]. Available: <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6758-penempatan-berdasarkan-jenis-kelamin-2006-2012.html> [Accessed 20 February 2013].
- Chant, S. 1992 Conclusion: towards a framework for the analysis of gender-selective migration. In: Chant, S. H. (ed.) *Gender and migration in developing countries*. London: Belhaven Press.
- Chin, C. B. N. 2002 The 'Host' State and the 'Guest' Worker in Malaysia: Public Management and Migrant Labour in Times of Economic Prosperity and Crisis. *Asia Pacific Business Review*, 8, 19-40.
- Dewi, Elisabeth 2010 Relationships between Women Migrant Workers and their Children in Indonesia; Feminist Perspectives, Community Values and Motherhood, PhD Thesis, Victoria University, Australia, 2010
- Enloe, C. 2000 *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, London, University of California Press, Ltd.
- HRW 2004 Help Wanted: Abuses Against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia. Human Rights Watch.
- Hugo, G. 1992. Women on the move: changing patterns of population movement of women in Indonesia. In: Chant, S. H. (ed.) *Gender and migration in developing countries*. London: Belhaven Press.
- Hugo, G. 2005 Indonesian International Domestic Workers: Contemporary Developments and Issues. In: Huang, S., Yeoh, B. S. A. & Noor Abdul, R. (eds.) *Asian women as transnational domestic workers*. Singapore: Marshall Cavendish Academic.
- ILO 2013 *Migrant workers* [Online]. Available: <http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--en/index.htm> [Accessed 20 February 2013].
- Jones, S. 2000 *Making money off migrants : the Indonesian exodus to Malaysia*, Hong Kong Wollongong, N.S.W., Capstrans, University of Wollongong Asia.

- Kabeer, Naila, *The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, UNSRID Discussion Paper No. 108, August 1999
- Kaur, A. 2007 *International Labour Migration in Southeast Asia: Governance of Migration and Women Domestic Workers Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*.
- Komnas Perempuan & Solidaritas Perempuan 2002 *Indonesian Migrant Workers: Systematic Abuse at Home and Abroad*, Jakarta, Komnas Perempuan (Indonesian National Commission on Violence against Women) and Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia.
- Komnas Perempuan & Solidaritas Perempuan 2003 *Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for the Protection of Their Rights (Indonesian Country Report to the UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, 2003)*, Jakarta, Komnas Perempuan (Indonesian National Commission on Violence against Women) and Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia.
- Pigay, N. 2005 *Migrasi tenaga kerja internasional : sejarah, fenomena, masalah dan solusinya*, Jakarta, Putaka Sinar Harapan.
- Yazid, S., 2013, *Indonesia's Civil Society in the Age of Democratization: NGO Responses on the Issue of Labour Migration*, Baden-Baden: Nomos.
- Young, K. 2006 Globalization and the changing management of migrating service workers in the Asia-Pacific. In: HEWISON, K. & YOUNG, K. (eds.) *Transnational Migration and Work in Asia*. Abingdon, Oxon, New York: Routledge.